

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan indeks Harga Konsumen/Inflasi Kabupaten Ponorogo mengikuti inflasi Kota Madiun, karena berada dalam satu kawasan wilayah proxy perekonomian. Dimana pada Bulan Juni 2024, inflasi *year on year* (y-on-y) Kota Madiun sebesar 1,85 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,28.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu :

- a. kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,78%
- b. kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,79%
- c. kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,10%
- d. kelompok kesehatan sebesar 0,53%
- e. kelompok transportasi sebesar 2,05%
- f. kelompok pendidikan sebesar 1,57%
- g. kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,32%
- h. kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,57%; dan
- i. kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,49%

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- a. ada sedikit peningkatan harga beras seiring dengan efek musiman penurunan produksi beras yang masih dalam periode tanam;
- b. selain itu ada peningkatan harga komoditi cabai rawit, hal ini dipengaruhi oleh faktor cuaca, kegagalan panen di champion dan faktor mekanisme pasar;
- c. terjadi keterlambatan pengiriman gas LPG 3 kg dikarenakan ada salah satu SPBE yang tutup sementara dan harus memperbaharui izin operasinya terlebih dahulu, sehingga mempengaruhi ketersediaan pasokan.

Meskipun demikian, tekanan harga diperkirakan dapat tertahan oleh beberapa faktor berikut :

1. Terjaganya ekspektasi masyarakat
2. Terjaganya distribusi

3. Ketersediaan stok barang di gudang

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sepanjang Triwulan II 2024, Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengeluarkan beberapa kebijakan, meliputi :

- a. penguatan kelembagaan TPID melalui Rapat Koordinasi
- b. melakukan monitoring melalui movev harga ke pasar baik tradisional dan ritel modern serta pengecekan stok di gudang beras Bulog
- c. melakukan pemantauan harga melalui aplikasi Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo)
- d. memberikan bantuan transportasi Angkutan Cerdas Sekolah (ACS)
- e. melaksanakan kegiatan JATILAN GPM (Jaga Stabilitas Inflasi Pangan, Gerakan Pangan Murah) keliling, dengan rincian sebagai berikut :

1. 2 April 2024 Balai Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo

2. 3 April 2024 Balai Desa Jurug Kecamatan Sooko

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa program dan kebijakan Kabupaten Ponorogo yang efektif dalam menjaga dan mengendalikan inflasi terutama TW II 2024 sebagai berikut :

- a. pemantauan harga dan kecukupan pasokan/sidak komoditas secara langsung ke sejumlah pasar, pedagang, distributor dan toko ritel
- b. analisa/evaluasi laporan Siskaperbapo (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok)
- c. melaksanakan Gerakan Pangan Murah di wilayah Kecamatan di kabupaten Ponorogo
- d. membuka Warung Jaga Stabilitas Inflasi Pangan, Gerakan Pangan Murah (JATILAN GPM) di pasar Songgolangit
- e. rapat Intern Anggota TPID Kabupaten Ponorogo.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Penguatan Kelembagaan

- meningkatkan koordinasi Anggota TPID Kabupaten Ponorogo

- mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah dengan Pemerintah Pusat yang dihadiri oleh Anggota TPID dan Forkopimda.

2. Produksi, distribusi dan konektivitas

- secara terus menerus memantau perkembangan harga dan kelancaran pasokan serta ketersediaan stok komoditas pokok, khususnya cabe rawit, beras, dan daging ayam ras. Pemantauan dilaksanakan dengan kunjungan langsung ke pasar, gudang dan distributor atau secara offsite yaitu melalui aplikasi Siskaperbapo

3. Penjajakan Kerjasama Antar Daerah

- adanya kondisi kelangkaan stok komoditas tertentu di Kabupaten Ponorogo yang diakibatkan jenis komoditas tersebut tidak dapat dihasilkan di wilayah sendiri, membuka ruang diperlukan adanya kerjasama dengan daerah lain yang berposisi sebagai daerah penghasil.